



## Telaah Kritis Kebijakan Kontemporer

Nur Annisa<sup>1</sup>, Abdusima Nasution<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email : [nisaritonga467@gmail.com](mailto:nisaritonga467@gmail.com)

### Abstract

*Contemporary policy represents a form of public policy designed to respond to dynamic social, economic, political, and technological changes in the era of globalization and digitalization. This article aims to analyze the concept, characteristics, implementation, and implications of contemporary policies for society and governance. This study employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected from various literature sources, including books, scientific journals, policy documents, and official publications relevant to public policy studies. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and critical conclusion drawing. The findings reveal that contemporary policies are characterized by data- and technology-based decision-making, participatory and collaborative approaches, responsiveness, adaptability, and sustainability orientation. However, their implementation still faces several challenges, including technological access disparities, limited resources, low digital literacy, and weak coordination among stakeholders. Contemporary policies also have significant implications for improving public service quality, enhancing community participation, and strengthening the principles of good governance. Therefore, continuous evaluation and supervision are necessary to ensure that implemented policies effectively, fairly, and sustainably address public needs.*

**Keywords:** *Contemporary Policy, Public Policy, Good Governance, Digitalization, Sustainable Development.*

### Abstrak

Kebijakan kontemporer merupakan bentuk kebijakan publik yang dirancang untuk merespons berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berkembang secara dinamis di era globalisasi dan digitalisasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, karakteristik, implementasi, serta implikasi kebijakan kontemporer terhadap masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi yang relevan dengan kajian kebijakan publik. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan kontemporer memiliki karakteristik utama berupa berbasis data dan teknologi, partisipatif, kolaboratif, responsif, adaptif, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kebijakan kontemporer juga memberikan implikasi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta penguatan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kebijakan Kontemporer, Kebijakan Publik, Good Governance, Digitalisasi, Pembangunan

## PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dalam kajian ilmu kebijakan, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai serangkaian tindakan yang dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat melalui proses perumusan, implementasi, dan evaluasi yang sistematis. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki peran penting sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sarana untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban sosial.<sup>1</sup>

Perkembangan globalisasi dan revolusi teknologi informasi telah mengubah dinamika kehidupan masyarakat secara cepat dan kompleks. Kemajuan teknologi digital, perubahan struktur ekonomi global, serta munculnya berbagai tantangan sosial baru mendorong pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif dan responsif. Kondisi tersebut melahirkan berbagai kebijakan kontemporer yang berorientasi pada transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan sosial, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab tantangan abad ke-21 yang semakin multidimensional.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, implementasi kebijakan kontemporer tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai kendala seperti ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kondisi lapangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya sering kali menghambat keberhasilan kebijakan. Selain itu, tidak sedikit kebijakan yang menimbulkan dampak yang tidak direncanakan, seperti ketimpangan akses, marginalisasi kelompok tertentu, maupun resistensi dari masyarakat yang terdampak. Dari perspektif akademik, kebijakan publik juga dipandang sebagai hasil interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan, nilai, dan kekuasaan yang berbeda sehingga proses pembentukannya tidak terlepas dari dinamika politik, ekonomi, dan sosial.<sup>3</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, telaah kritis terhadap kebijakan kontemporer menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas, relevansi, dan implikasi kebijakan dalam menjawab

---

<sup>1</sup> Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, 15th ed. (Boston: Pearson, 2017), hlm. 1–10.

<sup>2</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018), hlm. 12–25.

<sup>3</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45–67.

berbagai tantangan pembangunan. Pendekatan kritis memungkinkan peneliti mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan suatu kebijakan serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, dalam paradigma good governance, prinsip partisipasi, transparansi, kolaborasi, dan akuntabilitas harus menjadi bagian integral dari setiap proses kebijakan. Dengan demikian, kajian kritis tidak hanya berfungsi mengevaluasi keberhasilan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan telah diimplementasikan secara optimal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian dan analisis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kebijakan kontemporer. Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, serta berbagai referensi akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep, karakteristik, implementasi, dan implikasi kebijakan kontemporer. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka. Analisis dilakukan secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan kontemporer serta tantangan dan implikasinya dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Kebijakan Kontemporer**

Kebijakan kontemporer merupakan bagian dari kebijakan publik yang dirumuskan untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat pada era modern. Secara terminologis, kata *kontemporer* mengacu pada sesuatu yang berkembang dan sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Oleh karena itu, kebijakan kontemporer dapat dipahami sebagai kebijakan yang dirancang berdasarkan realitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang sedang berlangsung. Menurut Riant Nugroho, kebijakan kontemporer

merupakan kebijakan yang bersifat dinamis, adaptif, dan inovatif dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang terjadi secara cepat.<sup>4</sup> Dengan demikian, kebijakan kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian masalah publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan tantangan masa depan. Dalam praktiknya, kebijakan kontemporer memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebijakan tradisional. Kebijakan kontemporer cenderung lebih adaptif, fleksibel, dan berbasis data dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, kolaborasi antar lembaga, transparansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan tersebut dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Karakteristik ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju tata kelola yang lebih partisipatif dan kolaboratif.<sup>5</sup>

Perkembangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 menjadi faktor utama yang mendorong munculnya berbagai kebijakan kontemporer. Pemerintah dituntut untuk mampu merespons perubahan yang terjadi dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, berbagai program transformasi digital, penguatan sumber daya manusia, pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan sosial menjadi bagian penting dari kebijakan kontemporer yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah cara pemerintah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan sehingga proses kebijakan menjadi lebih cepat dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).<sup>6</sup>

Kebijakan kontemporer juga tidak terlepas dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan keadilan menjadi landasan dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Dengan adanya prinsip tersebut, kebijakan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan pemerintah, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah, sektor swasta,

---

<sup>4</sup> Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 89–95.

<sup>5</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34–48.

<sup>6</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018), hlm. 21–29.

organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum menjadi elemen penting dalam mewujudkan kebijakan yang demokratis dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, kebijakan kontemporer tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut antara lain kesenjangan akses teknologi, keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan. Selain itu, perubahan sosial yang sangat cepat sering kali menyebabkan kebijakan yang telah dirumuskan menjadi kurang relevan dalam waktu yang relatif singkat. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan kontemporer dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang dirancang secara adaptif, inovatif, dan responsif untuk menjawab berbagai tantangan masa kini melalui pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keberadaan kebijakan kontemporer menjadi penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di era modern.<sup>8</sup>

## **B. Karakteristik Kebijakan Kontemporer**

Kebijakan kontemporer memiliki karakteristik yang membedakannya dari kebijakan publik tradisional. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik telah mendorong perubahan dalam cara pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Karakteristik tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang di masyarakat.<sup>9</sup>

### **1. Berbasis Data dan Teknologi**

Salah satu karakteristik utama kebijakan kontemporer adalah penggunaan data dan teknologi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan pertimbangan administratif atau politik semata, tetapi juga

---

<sup>7</sup> United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 2019), hlm. 9–15.

<sup>8</sup> B. Guy Peters, *American Public Policy: Promise and Performance* (Washington, D.C.: CQ Press, 2021), hlm. 52–60.

<sup>9</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, hlm. 50–58

memanfaatkan berbagai sumber data yang diperoleh melalui sistem informasi digital, *big data*, *artificial intelligence* (AI), dan teknologi analitik lainnya. Penggunaan data memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi masalah secara lebih akurat, memprediksi dampak kebijakan, serta meningkatkan efektivitas program yang dijalankan. Selain itu, digitalisasi pemerintahan (*e-government*) turut mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.<sup>10</sup>

## 2. Partisipatif

Keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses kebijakan. Dalam paradigma pemerintahan modern, masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memberikan masukan, kritik, maupun rekomendasi terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, survei, diskusi daring, musyawarah pembangunan, maupun berbagai bentuk keterlibatan lainnya. Dengan adanya partisipasi publik, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki tingkat legitimasi yang lebih tinggi.

## 3. Kolaboratif

Kebijakan kontemporer juga ditandai dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam proses perumusan dan implementasinya. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan publik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas lokal. Kolaborasi tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Pendekatan ini dikenal sebagai *collaborative governance* yang semakin banyak diterapkan dalam kebijakan publik modern.

## 4. Responsif dan Adaptif

Perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat menuntut kebijakan publik untuk bersifat responsif dan adaptif. Kebijakan

---

<sup>10</sup> William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, hlm. 24–31.

kontemporer harus mampu merespons berbagai perubahan dan tantangan baru secara cepat tanpa mengabaikan tujuan utama yang ingin dicapai. Pemerintah dituntut untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang telah diterapkan agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat. Kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas kebijakan, terutama di era digital yang ditandai dengan perubahan yang berlangsung secara dinamis dan tidak menentu.

## 5. Berorientasi pada Keberlanjutan

Karakteristik terakhir dari kebijakan kontemporer adalah orientasinya terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kebijakan tidak hanya difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan kontemporer saat ini banyak diarahkan pada isu-isu seperti perlindungan lingkungan, pengurangan kemiskinan, penggunaan energi terbarukan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan kontemporer merupakan kebijakan yang memanfaatkan teknologi dan data, mendorong partisipasi masyarakat, mengedepankan kolaborasi lintas sektor, bersifat responsif terhadap perubahan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Karakteristik tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di era modern.

### C. Telaah Kritis Implementasi Kebijakan Kontemporer

Kebijakan kontemporer merupakan respons pemerintah terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Meskipun dirancang untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala dan menimbulkan dampak yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan telaah kritis untuk menilai efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Telaah ini

---

<sup>11</sup> United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, hlm. 5–13.

mencakup perspektif kritis dalam analisis kebijakan, kebijakan digitalisasi, kebijakan pendidikan kontemporer, kebijakan perlindungan sosial, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

### **1. Perspektif Kritis dalam Analisis Kebijakan**

Pendekatan kritis dalam analisis kebijakan berangkat dari pandangan bahwa kebijakan publik tidak pernah sepenuhnya bersifat netral. Setiap kebijakan lahir melalui proses politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, sumber daya, dan pengaruh yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan sering kali mencerminkan relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada isi kebijakan, tetapi juga pada proses pembentukannya serta kelompok-kelompok yang memperoleh manfaat maupun yang mengalami kerugian akibat kebijakan tersebut.<sup>12</sup>

Menurut paradigma kritis, keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup diukur berdasarkan pencapaian target administratif atau indikator kuantitatif semata. Kebijakan juga harus dinilai dari kemampuannya menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan. Dengan demikian, analisis kritis berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai ketimpangan yang mungkin muncul dalam proses maupun hasil kebijakan.<sup>13</sup>

### **2. Analisis Kritis terhadap Kebijakan Digitalisasi**

Transformasi digital menjadi salah satu kebijakan kontemporer yang banyak diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai layanan administrasi kini dapat diakses secara daring sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu, digitalisasi juga membantu pemerintah dalam mengelola data dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.<sup>14</sup>

### **3. Analisis Kritis terhadap Kebijakan Pendidikan Kontemporer**

Perubahan sistem pendidikan yang mengarah pada pembelajaran berbasis teknologi dan penguatan kompetensi abad ke-21 merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan kontemporer. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas

---

<sup>12</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, hlm. 12–20.

<sup>13</sup> Frank Fischer, *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 45–60.

<sup>14</sup> World Bank, *Digital Development Overview Report* (Washington, D.C.: World Bank, 2023), hlm. 10–

pembelajaran, kreativitas peserta didik, serta kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global.

Meskipun memiliki tujuan yang positif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, perbedaan kompetensi guru, serta kondisi sosial-ekonomi peserta didik yang beragam sering kali menyebabkan hasil kebijakan tidak merata. Oleh karena itu, dari perspektif kritis, kebijakan pendidikan harus tidak hanya berorientasi pada inovasi dan modernisasi, tetapi juga pada pemerataan akses dan keadilan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

#### **4. Analisis Kritis terhadap Kebijakan Perlindungan Sosial**

Kebijakan perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi. Kebijakan ini berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, melindungi kelompok rentan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan perlindungan sosial masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidakakuratan data penerima manfaat, potensi penyalahgunaan bantuan, serta munculnya ketergantungan terhadap program bantuan pemerintah. Oleh karena itu, analisis kritis menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan perlindungan sosial dapat mencapai tujuan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

#### **5. Tantangan Kebijakan Kontemporer**

Implementasi kebijakan kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial yang cepat menuntut pemerintah untuk mampu merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif. Selain itu, dinamika politik sering kali memengaruhi proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan tidak selalu berorientasi sepenuhnya pada kepentingan publik.<sup>15</sup>

Tantangan lainnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi. Jika tidak dikelola dengan baik, berbagai tantangan tersebut dapat

---

<sup>15</sup> James E. Anderson, *Public Policymaking: An Introduction*, 8th ed. (Boston: Cengage Learning, 2015), hlm. 115–123.

menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan kebijakan yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

#### **D. Implikasi Kebijakan Kontemporer Pada Masyarakat Dan Tata Kelola Pemerintahan**

Kebijakan kontemporer memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Di era modern, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berkembang dengan cepat. Implementasi kebijakan yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dari sisi masyarakat, kebijakan kontemporer memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, akses layanan publik, serta perlindungan hak-hak warga negara. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan transformasi digital telah membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan efisien. Namun demikian, kebijakan yang kurang tepat sasaran dapat menimbulkan ketimpangan sosial, kesenjangan akses layanan, dan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan publik.<sup>16</sup>

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kebijakan kontemporer mendorong penerapan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi publik. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) telah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi pemerintahan. Selain itu, kebijakan reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 137–140.

<sup>17</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024* (Jakarta: KemenPAN-RB, 2020), hlm. 12–15.

Di sisi lain, perkembangan kebijakan kontemporer menuntut pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global. Isu-isu seperti transformasi digital, perubahan iklim, keamanan siber, serta ketahanan ekonomi menjadi tantangan baru yang memerlukan respons kebijakan yang inovatif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan kontemporer tidak hanya memengaruhi kehidupan masyarakat, tetapi juga menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang dirancang secara partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan publik akan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Telaah kritis terhadap kebijakan kontemporer menunjukkan bahwa kebijakan publik pada era modern dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Kebijakan kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian masalah publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mengantisipasi perubahan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan kontemporer memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu berbasis data dan teknologi, partisipatif, kolaboratif, responsif dan adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada keberlanjutan. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju tata kelola yang lebih terbuka, demokratis, dan berbasis kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan.

Dari perspektif kritis, implementasi kebijakan kontemporer tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berbagai kebijakan seperti digitalisasi pelayanan publik, pembaruan sistem pendidikan, dan perlindungan sosial masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi masyarakat, ketidakakuratan data, serta pengaruh kepentingan politik dalam proses kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari pencapaian target administratif,

---

<sup>18</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 215–220.

tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan sosial, pemerataan manfaat, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, kebijakan kontemporer memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses layanan publik, memperkuat partisipasi warga negara, serta mendorong terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dengan demikian, kebijakan kontemporer menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik di tengah dinamika perubahan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Fischer, F. (2003). *Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices*. Oxford University Press.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). *Grand design reformasi birokrasi nasional 2020–2024*. Kementerian PAN-RB.
- Nugroho, R. (2021a). *Kebijakan publik di negara-negara berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2021b). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2011). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Kencana.
- Peters, B. G. (2021). *American public policy: Promise and performance*. CQ Press.
- United Nations Development Programme. (2019). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- World Bank. (2023). *Digital development overview report*. World Bank.

